



**Badan Kepegawaian  
Pendidikan Dan Pelatihan  
Kota Palangka Raya**

# **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2019**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya dapat menyusun Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya tahun 2019, dan semoga kita selalu berupaya secara konsisten untuk terus meningkatkan komitmen dan produktivitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk komitmen, tanggung jawab serta tekad Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya untuk melaksanakan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcomes* dalam rangka membangun prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.

Semoga melalui Laporan Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2019 ini dapat menjadi sarana evaluasi kinerja serta dapat memberikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang, agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Palangka Raya, Januari 2020  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA



**SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690308 199003 1 007

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	vii
 <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	2
1.3 Sumber Daya Manusia.....	5
1.4 Peran Strategis dan Isu Strategis Yang Dihadapi.....	7
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
 <b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1 Perencanaan Strategis .....	9
2.1.1 Tujuan.....	9
2.1.2 Sasaran .....	9
2.1.3 Strategi dan Kebijakan.....	10
2.1.4 Program dan Kegiatan .....	11
2.2 Indikator Kinerja Utama .....	13
2.2 Perjanjian Kinerja .....	13
 <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	16
3.1.1 Capaian kinerja Tahun 2019.....	16
3.1.2 Perkembangan kinerja dari tahun ke tahun.....	17
3.1.3 Perkembangan capaian kinerja terhadap Renstra ...	18
3.2 Analisis Capaian Kinerja .....	20

3.2.1	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural .....	20
3.3	Realisasi Anggaran .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	24
<b>LAMPIRAN</b>	.....	26



## DAFTAR TABEL

No.		Halaman
Tabel 1.1.	Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Status Kepegawaian .....	5
Tabel 1.2.	Rekapitulasi Pegawai BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat Jabatan .....	5
Tabel 1.3.	Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan .....	6
Tabel 1.4.	Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan Golongan.....	6
Tabel 2.1.	Matriks Hubungan Tujuan Strategis, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya. ....	10
Tabel 2.2.	Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2019. ....	11
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.....	14
Tabel 2.4.	Anggaran Program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.....	14
Tabel 2.5.	Matrix Perjanjian Kinerja dan program strategis BKPP Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019 .....	15
Tabel 3.1.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.....	16
Tabel 3.2.	Perbandingan Indikator Kinerja Utama dari tahun ke tahun .....	17
Tabel 3.3.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Palangka Raya terhadap Renstra 2018-2023.....	18
Tabel 3.4.	Perhitungan efisiensi persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2019 .....	20
Tabel 3.5.	Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung IKU persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2019.....	21
Tabel 3.6.	Anggaran dan Realisasi Anggaran pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.....	21

Tabel 3.7.	Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per jenis belanja pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.....	22
Tabel 3.8.	Anggaran dan Realisasi Belanja Program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019 .....	22

## DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
Gambar 1.1.	Struktur Organisasi BKPP Kota Palangka Raya .....	4

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya merupakan wujud dari kinerja dalam mencapai visi dan misi sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Raya 2018-2023, Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya 2018-2023 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2019. Selain itu, Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggarannya.

Implementasi peran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dalam tugas dan fungsinya membantu kepala daerah melaksanakan fungsi administrasi dan manajemen kepegawaian sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil tercermin dalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya 2018-2023 yaitu dalam memberikan dukungan atas misi kedua RPJMD : Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat *Smart Society* (Masyarakat Cerdas); dengan tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Dan sasaran strategis adalah terwujudnya profesionalitas ASN.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pada tahun 2019 pada proses pencapaian sasaran strategis terwujudnya profesionalitas ASN dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja dan penetapan kinerja 2019; melalui 7 (tujuh) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya tahun 2019 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 11.662.514.403,08 dan terealisasi sebesar Rp. 9.762.569.856,00 atau mencapai 83,71%

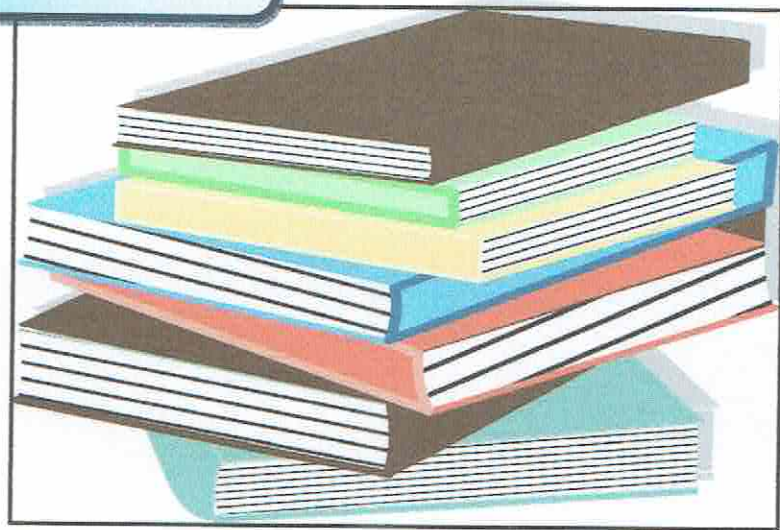
Dari hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis telah mencapai target dan upaya kedepan adalah dengan mengevaluasi beberapa kegiatan baik dari segi anggaran maupun perencanaan dengan membangun komitmen bersama dengan menuangkan dalam perjanjian kinerja antar kepala Badan Kepegawaian dan



Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya dengan pejabat eselon di lingkungan BKPSDM Kota Palangka Raya.

Dan dari hasil analisis terhadap kinerja program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja IKU 2019 dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip efisien dan efektif.

## **BAB I**



# **PENDAHULUAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya mengemban tugas dan fungsi yang strategis dalam urusan pemerintahan yaitu bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut BKPP Kota Palangka Raya dituntut untuk melaksanakan sesuai dengan asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, proposionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; dan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Asas akuntabilitas yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tanggal 15 November 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya terdapat perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menjadi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; namun dalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) tahun 2019 ini akan tetap menggunakan nomenklatur Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya mengingat pasal 15 angka (2) pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya akan dilaksanakan mulai Tahun 2020.

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun anggaran 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Kota Palangka Raya. Penyusunan laporan kinerja ini juga sebagai media informasi kepada para *stakeholder* atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta diharapkan dapat menjadi umpan balik demi perbaikan yang berkesinambungan bagi BKPP Kota Palangka Raya untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja ini merupakan *output* dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Pasal 21; serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, dengan pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok BKPP Kota Palangka Raya  
Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Fungsi BKPP Kota Palangka Raya
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi dan Manajemen Kepegawaian Daerah sesuai dengan kebijakan



umum yang ditetapkan oleh walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

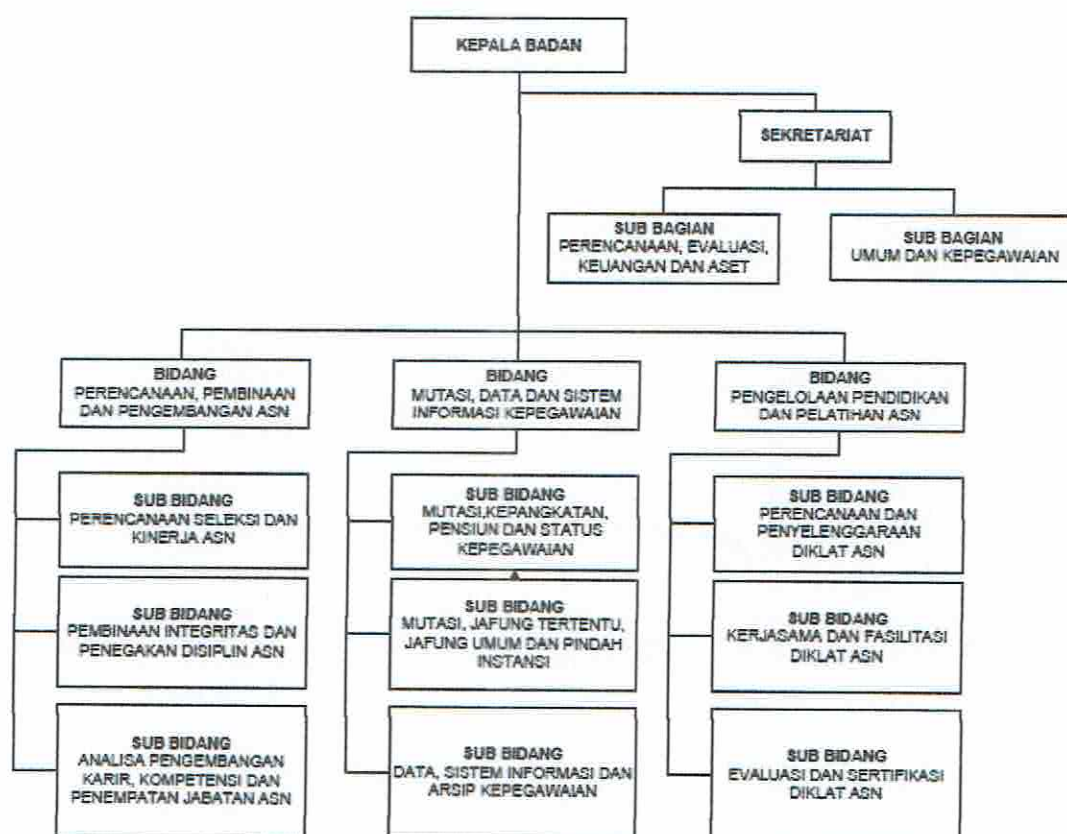
- b. Penyelenggaraan Administrasi dan Manajemen Pegawai berupa Perencanaan, Pembinaan, Pengembangan Karier, Mutasi, Penyusunan Data, Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. Pemantauan, Pembinaan, Evaluasi serta Pelaporan Administrasi dan Manajemen Pegawai berupa perencanaan, pembinaan, pengembangan karier, mutasi, penyusunan data, pengelolaan sistem informasi dan arsip kepegawaian, serta pengelolaan pendidikan dan pelatihan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- d. Melaksanakan konsultasi, koordinasi vertikal dan horizontal terhadap kementerian / lembaga / provinsi / instansi lain dalam lingkup administrasi dan manajemen kepegawaian;
- e. Pengawasan dan pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kota Palangka Raya, BKPP Kota Palangka Raya termasuk dalam badan tipe B, dengan komposisi struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat :
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Keuangan dan Aset; dan
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pembinaan dan Pengembangan ASN
  1. Sub Bidang Perencanaan, Seleksi dan Kinerja ASN;
  2. Sub Bidang Pembinaan Integritas dan Penegakan Disiplin ASN; dan
  3. Sub Bidang Analisa Pengembangan Karier, Kompetensi dan Penempatan Jabatan ASN.

- d. Bidang Mutasi, Data dan Sistem Informasi Kepegawaian
  - 1. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan, Pensiun dan Status Kepegawaian;
  - 2. Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional Tertentu, jabatan Fungsional Umum dan Pindah Instansi; dan
  - 3. Sub Bidang Data, Sistem Informasi dan Arsip Kepegawaian.
- e. Bidang Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan ASN
  - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Perencanaan Diklat ASN;
  - 2. Sub Bidang Kerjasama dan Fasilitas Diklat ASN;
  - 3. Sub Bidang Evaluasi dan Sertifikasi Diklat ASN.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi BKPP Kota Palangka Raya



Sumber : Lampiran IV Peraturan Walikota Palangka Raya  
Nomor 48 Tahun 2016.

### 1.3. Sumber Daya Manusia

Sebagaimana struktur organisasi di atas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya didukung Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara sebanyak 48 Orang yang dapat dirinci sebagai berikut :

- a. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Status Kepegawaian.

Tabel 1.1. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah (Orang)
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	48
2	Tenaga Kontrak	13
Jumlah		61

Sumber : DUK BKPP 2019

- b. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat Jabatan :

Tabel 1.2. Rekapitulasi Pegawai BKPP Kota Palangka Raya Berdasarkan Tingkat Jabatan

No	Jabatan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	Eselon II	1	0	0
2	Eselon III	2	2	4
3	Eselon IV	6	5	11
4	JFU	14	16	30
5	JFT	0	2	2
Jumlah		23	25	48

Sumber : DUK BKPP 2019

- c. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan :

Tabel 1.3. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
1	S-3	1	0	1
2	S-2	5	5	10
3	S-1	13	12	25
4	D-4	2	1	3
5	D-3	-	6	6
6	SMU	2	1	3
Jumlah		23	25	48

Sumber : DUK BKPP 2019

- d. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan Golongan

Tabel 1.4. Rekapitulasi ASN BKPP Kota Palangka Raya berdasarkan Golongan

No	UNIT KERJA	JML PNS	GOLONGAN																				
			IV					III					II					I					
			A	B	C	D	E	J M L	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	J M L	A	B	C	D	J M L
1.	KEPALA BADAN	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
2.	SEKRETARIAT	12	-	1	-	-	-	1	4	1	3	1	9	-	1	-	1	2	-	-	-	-	0
3.	BIDANG PERENCANAAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ASN	12	1	-	-	-	-	1	2	3	5	-	10	-	1	-	-	1	-	-	-	-	0
4.	BIDANG MUTASI, DATA, SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	15	1	-	-	-	-	1	5	1	6	2	14	-	-	-	-	0	-	-	-	-	0
5.	BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ASN	8	1	-	-	-	-	1	2	1	1	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
JUMLAH TOTAL		48	3	2	-	-	-	5	13	6	15	6	40	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-

Sumber : DUK BKPP 2019



#### 1.4. Peran Strategis dan Isu Strategis yang Dihadapi

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya memiliki peran strategis yaitu pelaksana urusan pemerintahan dibidang kepegawaian. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan fungsi administrasi dan manajemen kepegawaian.

Peran strategis BKPP Kota Palangka Raya juga tercermin dalam RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya 2018-2023 yaitu dalam misi kedua yaitu "Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)"; dengan tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan sasaran adalah terwujudnya profesionalitas ASN.

Isu - isu strategis yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya diantaranya adalah :

1. Perubahan dan perkembangan peraturan bidang kepegawaian yang harus ditangani secara cepat dan tepat;
2. Penataan ASN berbasis kompetensi dan peningkatan kualitas SDM ASN sebagai penyokong penyelenggara pemerintah daerah;
3. Belum akuratnya database kepegawaian guna mendukung pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien.

#### 1.5. Sistematika Penulisan

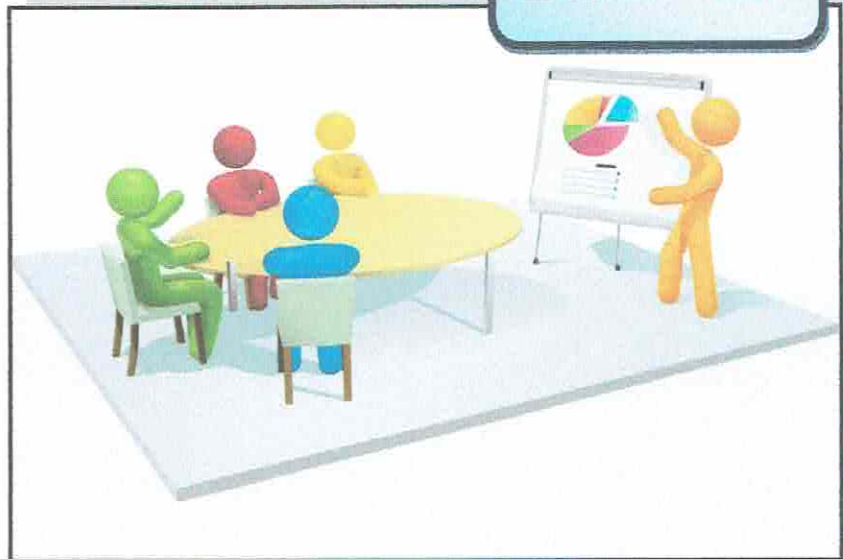
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- |               |  |
|---------------|--|
| <b>Bab I</b>  | <b>Pendahuluan</b> , berisikan latar belakang; Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi; Sumber Daya Manusia; Peran Strategis dan Isu Strategis yang dihadapi; Sistematika Penulisan. |
| <b>Bab II</b> | <b>Perencanaan Kinerja</b> , berisikan Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.  |

**Bab III Akuntabilitas Kinerja,** berisikan Capaian Kinerja Organisasi, Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.

**Bab IV Penutup,** berisikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dalam mengatasi hambatan dalam pencapaian kinerja.

## **BAB II**



## **PERENCANAAN KINERJA**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan Strategis**

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023 yaitu "Terwujudnya Kota Palangka Raya menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera untuk Semua", Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya sebagai pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian mempunyai peran dalam memberikan dukungan atas misi kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya tahun 2018 - 2023 yaitu **"Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas)" meliputi : pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.**

##### **2.1.1. Tujuan**

Untuk menggambarkan arah strategi organisasi, meletakkan kerangka prioritas dan fokus kondisi yang ingin diciptakan sesuai pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018 - 2023, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya maka yang menjadi tujuan strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya tahun 2018 - 2023 adalah :

**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan**

##### **2.1.2. Sasaran**

Sasaran merupakan ukuran pencapaian dan tujuan strategis. Sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya merupakan bagian integrasi dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka



Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 untuk tujuan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan yaitu "Terwujudnya Profesionalitas ASN".

Tabel 2.1. Matriks Hubungan Tujuan Strategis, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya.

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah	Nilai SAKIP	Terwujudnya profesionalitas ASN	Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.

### 2.1.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program / indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Dalam mencapai tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya terdapat strategi sebagai berikut.

1. Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan yang efektif berdasarkan analisa jabatan;
2. Mewujudkan data kepegawaian yang akurat dan valid.

Adapun kebijakan atau arah/tindakan yang diambil Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya untuk mencapai tujuan strategis adalah sebagai berikut :

1. Penataan dan pemberdayaan aparatur yang telah ditetapkan melalui hasil analisa jabatan;
2. Pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi.

#### 2.1.4. Program dan Kegiatan

Untuk mengoperasionalkan strategi dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJMD Kota Palangka Raya melalui sasaran strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya 2018 - 2023 pada tahun 2019 didukung oleh 7 program yang terbagi menjadi 4 program pendukung dan 3 program strategis dengan uraian program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2019.

Program	Kegiatan
1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik, Telp dan Speedy Internet. 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor 8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 11. Penyediaan Makanan Dan Minuman 12. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 13. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah. 14. Penyediaan Jasa Event Palangka Fair 15. Penyediaan Jasa Publik Media
1.2 Program Prasarana Peningkatan Sarana dan Aparatur	1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2. Pengadaan Peralatan Kantor 3. Pengadaan Perlengkapan Kantor 4. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya

Program	Kegiatan
1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi ASN Daerah</li> <li>2. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CASN Daerah</li> <li>3. Pemberian Beasiswa Pendidikan Tugas Belajar Bagi ASN</li> <li>4. Pemrosesan Rekomendasi Mengikuti Seleksi Ijin Belajar, Tugas Belajar dan Pengakuan Gelar</li> <li>5. Diklatpim Tingkat II, III, IV</li> <li>6. Workshop Tata Cara Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai</li> <li>7. Pengelolaan dan Monev Kediklatan</li> </ol>
1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Laporan Capaian, Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</li> <li>2. Penyusunan Pelaporan Keuangan</li> <li>3. Penyusunan Program dan Rencana Kerja</li> <li>4. Inventarisasi Barang Milik Daerah/Aset</li> </ol>
1.6 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Rencana Pembinaan Karir Aparatur Sipil Negara (ASN)</li> <li>2. Seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)</li> <li>3. Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)</li> <li>4. Pelantikan Pejabat</li> <li>5. Assesment Pejabat</li> <li>6. Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi</li> <li>7. Seleksi Penerimaan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja)</li> </ol>
1.7 Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan Administrasi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Non JFT</li> <li>2. Verifikasi Tenaga Kontrak</li> <li>3. Pengelolaan SIMPEG</li> </ol>

Sumber : RKA Perubahan 2019



## **2.2. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penanda capaian keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan fungsi dan tugas yang diembannya.

Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) yang digunakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya disusun dengan mengacu Rencana Strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palangka Raya periode 2018-2023 serta keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya nomor 870/178.1/BKPP/VII/2019 tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya tahun 2018 - 2023 yaitu prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.

## **2.3. Perjanjian Kinerja**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian kerja merupakan lembar/dokumen dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2019 ditetapkan dengan mengacu pada sasaran strategis RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018 - 2023, RENSTRA BKPP 2018-2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2019, Rencana Kerja (RENJA) tahun 2019 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 beserta perubahannya.



Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
Terwujudnya Profesionalitas ASN	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	70	%

Sumber : Perjanjian Kinerja BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019

Dalam Perjanjian Kinerja juga ditetapkan anggaran untuk setiap kegiatan. Total Anggaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya untuk tahun anggaran 2019 adalah Rp. 11.662.514.403,08 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 3.554.285.893 dan Belanja Langsung Rp. 8.108.228.510,08.

Berikut perincian anggaran untuk setiap program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019 :

Tabel 2.4. Anggaran Program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.

No.	Program	Anggaran
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.833.988.885,08
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 155.725.000,00
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 27.550.000,00
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 3.207.389.250,00
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 49.029.050,00
6.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Rp. 2.368.556.150,00
7.	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	Rp. 465.090.175,00
	Jumlah	Rp. 8.108.228.510,08

Sumber : DPPA BKPP Kota Palangka Raya TA. 2019.

Tabel 2.5. Matrix Perjanjian Kinerja dan program strategis BKPP Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2019

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Terwujudnya profesionalitas ASN	1. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural.	70	%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 3.207.389.250,00
					Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur	Rp. 2.368.556.150,00
					Program Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	Rp. 465.090.175,00

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja dan DPPA 2019.

## **BAB III**



# **AKUNTABILITAS KINERJA**

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 perlu dilakukan pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target (rencana) dengan realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kemudian akan dilakukan analisis penyebab serta alternatif solusi atas senjangan antara target dan realisasi tersebut.

##### 3.1.1. Capaian Kinerja Tahun 2019

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Kota Palangka Raya Nomor 870/178.1/BKPP/VII/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2019 ditetapkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Prosentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

Berikut disajikan capaian indikator kinerja utama (IKU) BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian
<b>Tujuan Strategis :</b>			
<i>Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan</i>			
<b>Indikator Tujuan :</b>			
<i>Nilai SAKIP</i>			
<b>Sasaran Strategis</b>			
<i>Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>			



	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Capaian
1	Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	70%	83,18%

Sumber : Data diolah (2020).

Dalam rangka membentuk kompetensi kepemimpinan Aparatur Pemerintah kota Palangka Raya sesuai dengan jenjang jabatan struktural, pada tahun 2019 Pemerintah Kota Palangka Raya melalui BKPP Kota Palangka Raya mengirimkan 39 pejabat struktural yang terdiri dari 10 pejabat administrator dan 29 pejabat pengawas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV; Dan jumlah pejabat yang telah mengikuti diklat struktural sampai dengan Tahun 2019 adalah 633 pejabat struktural dari total 761 jabatan struktural yang terisi pada tahun 2019, sehingga target IKU Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural pada tahun 2019 tercapai 83,18% atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahunan pada tahun 2019.

### 3.1.2. Perkembangan Kinerja Dari Tahun Ke Tahun

Berikut disajikan capaian Indikator Kinerja Utama dari tahun ke tahun :

Tabel 3.2. Perbandingan Indikator Kinerja Utama dari tahun ke tahun

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	% Realisasi Kinerja (tahun)				
			2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sasaran Strategis</b>							
<i>Terwujudnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</i>							
1	Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	83,18	-	-	-	-

Sumber : Data diolah (2020).

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2019 sehingga belum dapat dilakukan perbandingan kinerja dari tahun ke tahun.

### 3.1.3. Perkembangan Capaian Kinerja terhadap Renstra

Berikut perkembangan kinerja IKU "Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural" terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra BKPP Tahun 2018-2023 yang ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPP Kota Palangka Raya terhadap Renstra 2018-2023.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian			Target Tahun 2019
			2018	2019	2018 s.d. 2019	
Sasaran Strategis						
Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sipil Negara						
1	Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	%	87,31%	(4,13%)	83,18%	70%

Sumber : Data diolah (2019).

Pencapaian IKU "Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural" sampai dengan tahun 2019 adalah 83,18%; melampaui target tahun 2019 yang telah ditetapkan pada RPJMD Pemerintah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Adapun keberhasilan dalam pencapaian sasaran tersebut disebabkan beberapa faktor :

1. Anggaran keikutsertaan pejabat struktural Pemerintah Kota Palangka Raya TA. 2019 pada Diklatpim telah dipusatkan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya;

2. Pada Tahun 2016 dan 2017 anggaran pada program strategis BKPP Kota Palangka Raya hampir sebagian besar difokuskan pada Kegiatan Diklatpim Tk. IV dengan pola kerjasama antara Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan Nota Kesepahaman Nomor 7 / KB-KSD /PLK/2016 dan Nomor 20 / K1 / HKM. 03. 1 tanggal 27 April 2016 tentang Kerjasama penguatan kapasitas Pemerintah Kota Palangka Raya melalui penyelenggaraan kegiatan kajian kebijakan, pendidikan dan pelatihan, inovasi, administrasi Negara serta pendidikan tinggi. Sehingga meningkatkan rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pada Pemerintah Kota Palangka Raya terutama pada pejabat eselon IV.

Data awal 2018 untuk jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural pada Pemerintah Kota Palangka Raya adalah 702 orang dengan jumlah jabatan struktural yang terisi berjumlah 804 jabatan.

Bila dibandingkan dengan tahun 2018 yang merupakan tahun terakhir Renstra RPJMD 2013-2018 pencapaian tahun 2019 lebih rendah (4,13%) hal ini disebabkan adanya rotasi, mutasi dan promosi pejabat struktural pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyesuaikan perubahan susunan perangkat daerah pemerintah Kota Palangka Raya sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan.



### 3.2. Analisis Capaian Kinerja

#### 3.2.1. Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural

Program yang relevan mendukung pencapaian kinerja pada IKU Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural adalah Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4. Realisasi Program dan Kegiatan yang mendukung IKU Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural tahun 2019.

Kegiatan	Satuan	Target Output	Realisasi Output	% Realisasi
Program :				
<i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>				
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	Orang	39	39	100

Sumber : Data diolah (2020).

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Palangka Raya mengirimkan sebanyak 39 orang pejabat struktural untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) yang terdiri dari 10 orang pejabat administrator dan 29 orang pejabat pengawas. Sampai dengan tahun 2019 jumlah seluruh pejabat ASN pada Pemerintah Kota Palangka Raya yang telah mengikuti Diklatpim adalah sebanyak 633 orang dengan jumlah jabatan struktural yang terisi 761 jabatan. Sehingga prosentase ASN yang telah mengikuti Diklatpim sampai dengan tahun 2019 sebesar 83,18%.



Tabel 3.5. Perhitungan Efisiensi IKU Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural tahun 2019.

Kegiatan	% Realisasi Output	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Program : <i>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</i>			
1. Diklat Kepemimpinan Tingkat II, III dan IV	100	94,97	1,05

Sumber : Data diolah (2020).

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan Struktural pada tahun 2019 adalah sebesar 1.05%, artinya setiap 1% realisasi anggaran mampu menghasilkan output kegiatan sebesar 1,05% sehingga penggunaan sumber daya dalam mencapai target IKU dapat dikategorikan sangat efisien dengan capaian di atas 1.

### 3.3. Realisasi Anggaran

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD Kota Palangka Raya dengan anggaran sebesar Rp. 11.662.514.403,08; dan sampai dengan 31 Desember 2019 anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 9.762.569.856,00 atau mencapai 83,71%.

Tabel 3.6. Anggaran dan Realisasi Anggaran pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran	
		Rp.	Rp.	%
1.	Belanja Tidak Langsung	3.554.285.893,00	3.258.034.084,00	91,66%
2.	Belanja Langsung	8.108.228.510,08	6.504.535.772,00	80,22%
	Jumlah	11.662.514.403,08	9.762.569.856,00	83,71%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKPP 2019

Realisasi anggaran Belanja Tidak langsung adalah 91,66% dan Belanja Langsung adalah 80,22% dari anggaran BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019 sebesar Rp. 11.662.514.403,08

Prosentase realisasi Belanja Langsung secara berurut yaitu dari realisasi belanja modal sebesar 94,14%; Belanja Barang & Jasa sebesar 82,10%; dan Belanja Pegawai sebesar 70,92%.

Tabel 3.7. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per jenis belanja pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1.	Belanja Pegawai	1.459.500.000,00	1.035.177.500,00	70,92%
2.	Belanja Barang & Jasa	6.561.403.510,08	5.387.104.372,00	82,10%
3.	Belanja Modal	87.325.000,00	82.253.900,00	94,19%
	Jumlah	8.108.228.510,08	6.504.535.772,00	80,20%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran BKPP 2019

Tabel 3.8. Anggaran dan Realisasi Belanja Program pada BKPP Kota Palangka Raya Tahun 2019.

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.833.988.885,08	1.574.401.658,00	85,85
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	155.725.000,00	105.640.900,00	67,84
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	27.550.000,00	27.550.000,00	100
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	3.207.389.250,00	3.040.144.330,00	94,79
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49.929.050,00	24.333.000,00	48,74

No.	Program	Anggaran	Realisasi Anggaran	
			Rp.	%
6.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.368.556.150,00	1.479.576.384,00	62,47
7.	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	465.090.175,00	252.889.500,00	54,37
Jumlah		8.108.228.510,08	6.504.535.772,00	80,22

Sumber : Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan BKPP 2019.

Prosentase realisasi belanja program secara berurut dari tertinggi sampai terendah adalah :

1.	Peningkatan Disiplin Aparatur	100%
2.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92,66%
3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	85,85%
4.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	67,84%
5.	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	62,47%
6.	Peningkatan Pelayanan Kepegawaian	54,37%
7.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	48,74%

## **BAB IV**



# **PENUTUP**



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan Kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palangka Raya 2018-2023 yang disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2019 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu Prosentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dengan nilai pencapaian kinerja 83,18% atau telah mencapai target RPJMD untuk Tahun 2019.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 bersumber dari APBD Kota Palangka Raya dengan anggaran sebesar Rp. 11.662.514.403,08; dan sampai dengan 31 Desember 2019 anggaran yang terserap adalah sebesar Rp. 9.762.569.856,00 atau terealisasi 83,71%.

Upaya kedepan adalah meningkatkan kinerja dengan mengevaluasi beberapa kegiatan baik dari segi anggaran maupun perencanaan; melakukan peningkatan terhadap sistem pengendalian intern SOPD

dan membangun komitmen bersama dengan menuangkan dalam perjanjian kinerja antar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya dengan pejabat eselon di lingkungan BKPSDM Kota Palangka Raya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Badan Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Palangka Raya kepada pihak – pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Palangka Raya.

Palangka Raya, Januari 2020

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KOTA PALANGKA RAYA



**SABIRIN MUHTAR, S.Sos., M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19690308 199003 1 007